



## Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan

Volume 5 Nomor 3 Juni 2023 Halaman 1300 - 1312

<https://edukatif.org/index.php/edukatif/index>

### Penanaman Nilai Nasionalisme dalam Pendidikan Karakter di Sekolah Melalui Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter

Cucu Sutrisno<sup>1✉</sup>, Samsuri<sup>2</sup>

Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>

e-mail : [cucu\\_sutrisno@uny.ac.id](mailto:cucu_sutrisno@uny.ac.id)<sup>1</sup>, [samsuri@uny.ac.id](mailto:samsuri@uny.ac.id)<sup>2</sup>

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menjelaskan konsepsi penanaman nilai nasionalisme dalam pendidikan karakter di sekolah melalui Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter. Penelitian ini menggunakan metode analisis konten yang bersifat inferensial berupa proses mendeskripsikan, mengklasifikasi, memaknai dan menyimpulkan penanaman nilai nasionalisme dalam pendidikan karakter di sekolah melalui Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Sumber data yang digunakan adalah dokumen berupa peraturan perundang-undangan dan modul terkait Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemunculan Gerakan PPK memiliki nuansa politik yang kental karena bermula dari adanya Program Nawacita dan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Konsepsi pendidikan karakter melalui Gerakan PPK berupaya mengoptimalkan setiap aspek dalam pendidikan karakter di sekolah yang mengarah pada penciptaan pendidikan karakter dengan pendekatan komprehensif. Pemaknaan dan interpretasi nilai karakter nasionalisme dalam konsepsi Gerakan PPK perlu di revitalisasi agar lebih komprehensif dan sesuai dengan tantangan zaman di era kontemporer. Sehingga optimalisasi pendidikan karakter melalui Gerakan PPK masih harus lebih dioptimalkan lagi.

**Kata Kunci:** karakter, nasionalisme, pendidikan karakter.

#### Abstract

*This study aims to explain the conception of the inculcation of nationalism values in character education in schools through the Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). This study uses an inferential content analysis method in the form of a process of describing, classifying, interpreting and concluding the planting of nationalism values in character education in schools through the Gerakan PPK. The data sources used are documents in the form of statutory regulations and modules related to the Gerakan PPK. The results of this research indicate that the emergence of the KDP Movement has a strong political overtones because it stems from the Nawacita Program and the Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). The conception of character education through the Gerakan PPK seeks to optimize every aspect of character education in schools which leads to the realization of character education with a comprehensive approach. However, this still needs to be optimized. One of them is the meaning and interpretation of the value of the character of nationalism in the conception of the Gerakan PPK that needs to be revitalized so that it is more comprehensive and in line with the challenges of the times in the contemporary era.*

**Keywords:** character, nationalism, character education.

Copyright (c) 2023 Cucu Sutrisno, Samsuri

✉ Corresponding author :

Email : [cucu-sutrisno@uny.ac.id](mailto:cucu-sutrisno@uny.ac.id)

DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i3.4981>

ISSN 2656-8063 (Media Cetak)

ISSN 2656-8071 (Media Online)

## PENDAHULUAN

Nasionalisme Indonesia merupakan sumber dan akar bagi eksistensi Bangsa dan Negara Indonesia hingga masa kini dan masa depan sebab bangsa dan negara ini didirikan dengan semangat kebangsaan (nasionalisme) di dalamnya. Pertumbuhan nasionalisme di Era Pergerakan Nasional yang dimaknai sebagai persatuan bangsa untuk merdeka dan lepas dari penjajahan kolonial telah mendorong lahirnya berbagai pergerakan kemerdekaan (Handayani, 2019). Pada masa itu, nasionalisme diperankan sebagai ideologi persatuan melawan ketertindasan menuju kehidupan yang bebas dan merdeka (Kahin, 2013). Sehingga tidak salah jika nasionalisme erat kaitannya dengan keberadaan dan eksistensi negara-bangsa (Lay, 2006). Sejak berdirinya Negara Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memiliki identitas nasional sebagai realitas baru yang mempersatukan keragaman identitas primordial yang telah ada sebelumnya yang memiliki sifat yang heterogen terdiri dari beragam ras, suku, agama, kebudayaan dan lain sebagainya (Supratikno, 2022). Nasionalisme Indonesia memanglah terlahir dari perjuangan melawan kolonialisme dengan dipengaruhi politik identitas dan solidaritas nasional (Alfaqi, 2015).

Nasionalisme Indonesia di Era Globalisasi mengalami tantangan besar pada Era Globalisasi yang menyajikan perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan kebudayaan dengan ditopang pesatnya perkembangan teknologi, telekomunikasi dan transportasi telah mengarah pada pemudaran sekat-sekat ruang dan waktu antarbangsa dan/atau antar negara (Aulia et al., 2021; Handayani, 2019; Syahira Azima et al., 2021). Di era ini, adanya perkembangan teknologi digital dengan kehadiran kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) sangat berbahaya karena memungkinkan manusia kehilangan sisi kemanusiaannya termasuk pada aspek karakter (Cathrin & Wikandaru, 2023). Karakter nasionalisme pada generasi muda juga sangat rentan terkikis seiring dengan derasny arus globalisasi (Puspita Ratri & Najicha, 2022). Nasionalisme bangsa Indonesia menghadapi tantangan besar di tengah derasny arus globalisasi pada Abad 21 yaitu, ancaman memudarnya nasionalisme dan identitas nasional. Globalisasi menyebabkan adanya disorientasi nilai dan memudarnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat (Pangestu, 2022). Salah satu wujudnya adalah masuknya budaya asing tanpa mampu difiltrasi dengan berpedoman pada nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan akan menyebabkan pemudaran jiwa nasionalisme (Syahira Azima et al., 2021). Selain itu, ada tantangan eksternal; dan internal di era globalisasi yang dapat merongrong nasionalisme Indonesia. Tantangan pada lingkungan eksternal berupa upaya dominasi negara-negara besar/maju terhadap negara Indonesia dengan dalih globalisasi dan pasar bebas serta tantangan pada lingkungan internal berupa disintegrasi Bangsa dan Negara Indonesia yang dilakukan kelompok-kelompok berbasis kedaerahan, agama dan lain sebagainya (Sulistiyono, 2018).

Makin mewabahnya radikalisme adalah salah satu bentuk memudarnya nasionalisme dan identitas nasional sebab radikalisme merupakan ancaman nyata yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa sehingga upaya-upaya penanganannya tidak boleh tidak untuk terus gencar dilaksanakan (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015). Mirisnya, salah satu yang kerap menjadi media penyebaran radikalisme adalah lembaga pendidikan yang merupakan media tradisional atau tempat yang kerap menjadi ruang persebaran radikalisme (*hotspots*). Pemanfaatan lembaga pendidikan sebagai media inkubator sekaligus penyemaian radikalisme dilatarbelakangi oleh strategisnya posisi lembaga ini sebagai pranata sosial yang menentukan kondisi sosial masyarakat dimasa kini dan masa mendatang melalui generasi muda yang dididik di dalamnya. Radikalisme dalam sektor pendidikan menysasar peserta didik yang secara psikologis masih dalam masa pencarian jatidiri yang haus akan pengetahuan, dan kebenaran. Pada kondisi demikian, peserta didik yang *notabene* kaum muda (*youth*) lebih banyak memiliki kecenderungan dan kemungkinan untuk terlibat dan menerima radikalisme dibandingkan orang dewasa (*adult*). Krisis identitas pada diri kaum muda memungkinkan mereka mengalami *cognitive opening* (pembukaan kognitif) yang memudahkan adanya penerimaan terhadap gagasan baru yang lebih radikal (Azca, 2013). Generasi muda bangsa Indonesia terutama yang masih berada pada usia sekolah menengah memiliki

kerentanan yang tinggi sebab berada pada fase kritis perkembangan manusia karena merupakan masa pembentukan kematangan emosional dan masa pencarian identitas diri (Elias et al., 2003). Apalagi remaja saat ini mendapatkan banyak bahaya bagi pengembangan jati dirinya akibat pengaruh negatif di media dan sumber eksternal lainnya yang telah dianggap lazim dalam budaya saat ini. Pembimbingan diperlukan agar generasi muda mengetahui mana yang benar dan yang salah serta untuk melatih pengendalian diri dan konsistensi mereka dalam bersikap dan bertindak dengan baik dan benar (Pala, 2011).

Nasionalisme Indonesia pada hakikatnya selalu mengalami perkembangan melalui pemaknaan dan reinterpretasi sesuai dengan realita di setiap zamannya mulai dari Era Pergerakan Nasional, Era Orde Lama, Era Orde Baru hingga Era Reformasi (Handayani, 2019). Oleh karena itu, guna menghadapi dan mengatasi tantangan zaman yang semakin kompleks diperlukan redefinisi dan revitalisasi nasionalisme Indonesia melalui elaborasi nasionalisme yang tidak hanya menekankan aspek ideologi-politik—bentuk nasionalisme romantik, kewarganegaraan, kebudayaan, perekonomian, etnik, maupun penyelenggaraan pemerintahan (Supardan, 2011). Nasionalisme memang erat kaitannya dengan keberadaan dan eksistensi negara-bangsa karena unsur emosionalitas berupa semangat kebersamaan berdasar kesamaan perasaan dan nasib yang diikuti kehendak untuk membangun suatu bangsa yang mandiri berlandaskan kesatuan jiwa dan kesetiakawanan, kehendak untuk bersatu, serta menciptakan keadilan dan kebersamaan menuju terbentuknya bangsa yang berdaulat dan bermartabat (Pangestu, 2022). Namun demikian, pemaknaan nasionalisme saat ini janganlah hanya sebatas pada semangat kebangsaan dengan kerelaan berkorban (patriotisme) tanpa pamrih untuk bangsa dan negara. Sebaliknya, nasionalisme harus dimaknai secara komprehensif meliputi dimensi internal (substansi) berupa keadilan sosial, kemerdekaan, demokrasi, kesamaan dan prestasi karena nasionalisme dan negara bangsa adalah pakta perjanjian yang menempatkan kesejajaran diantara keduanya (Lay, 2006). Sikap nasionalisme harus juga perlu dimaknai sebagai suatu penilaian atau evaluasi terhadap rasa cinta tanah air dan bangsa atas kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Implementasinya melalui pemenuhan unsur-unsur nasionalisme berupa cinta terhadap tanah air dan bangsa, berpartisipasi dalam pembangunan, menegakkan hukum dan menjunjung keadilan sosial, memanfaatkan sumberdaya sekaligus berorientasi pada masa depan, berprestasi, mandiri dan bertanggung jawab dengan menghargai diri sendiri dan orang lain, serta siap berkompetisi dengan bangsa lain dan terlibat dalam kerjasama internasional (Faturachman & Kusumawardani, 2004).

Sehubungan dengan itu, maka generasi muda Bangsa Indonesia harus dibimbing dan diarahkan agar memiliki karakter nasionalisme dalam dirinya yang sesuai dengan perubahan dan tantangan zaman yang dihadapinya. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran strategis untuk melaksanakannya melalui prakarsa pendidikan karakter yang mampu menanamkan nilai nasionalisme pada peserta didik. Sebab, pendidikan karakter merupakan sebuah ikhtiar untuk mengarahkan seseorang agar berkarakter baik. Pendidikan karakter dapat dimaknai serupa dengan pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti atau pendidikan moral. Pendidikan budi pekerti adalah upaya membangun kecerdasan budi pekerti agar manusia dapat menguasai dirinya sehingga tidak lagi memiliki jiwa yang jahat atau setidaknya mengurangi tabiat-tabiat yang jahat yang ada dalam dirinya (Dewantara, 2011). Hal ini berarti bahwa pendidikan budi pekerti adalah sebuah tuntunan yang mengarahkan seseorang untuk memiliki budi pekerti yang baik. Beririsan dengan makna tersebut, pendidikan karakter adalah pendekatan yang secara langsung difokuskan untuk merubah perilaku moral manusia (Carr, 2014). Pendidikan karakter adalah upaya yang disengaja untuk mempromosikan pengembangan kebajikan, nilai-nilai moral, dan *moral agency* terutama yang dilaksanakan di sekolah (Berkowitz & Hoppe, 2009). Pendidikan karakter mengandung tiga unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan (*knowing the good*), mencintai kebaikan (*desiring the good*) dan melakukan kebaikan (*doing the good*) (Lickona, 2018). Pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti (Sudrajat, 2011). Pendidikan karakter tidak hanya mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah saja namun lebih dari itu

juga menanamkan kebiasaan (*habituation*) tentang yang baik sehingga peserta didik paham, mampu merasakan, dan mau melakukan yang baik (Marzuki, 2012). Berdasarkan definisi tersebut, pendidikan karakter meliputi ranah kognitif, afektif, dan perilaku serta mencakup strategi mulai dari penalaran moral dan dilema etika hingga klarifikasi nilai dan bahkan pembelajaran layanan masyarakat (Williams, 2000).

Terdapat berbagai pendekatan pendidikan karakter mulai dari yang tradisional hingga kontemporer. Pendekatan dalam pendidikan karakter berarti cara untuk mengatasi masalah dalam pendidikan karakter atau untuk mencapai tujuan pendidikan karakter. Pendekatan dan/atau strategi tunggal dalam pendidikan karakter kurang relevan diterapkan mengingat adanya kompleksitas kehidupan di Era pesatnya perkembangan zaman saat ini (Zuchdi et al., 2013). Pendekatan yang tepat untuk pendidikan karakter adalah pendekatan komprehensif dan holistik (Sudrajat, 2011). Pendekatan komprehensif merupakan sintesis antara pendekatan-pendekatan yang bersifat tradisional dengan pendekatan kontemporer (Zuchdi, 2009). Pendekatan ini pertama kali dikemukakan oleh Kirschenbaum (1995) merespon pendekatan pendidikan nilai dan pendidikan moral di Amerika Serikat yang dianggapnya hanya menawarkan solusi yang bersifat parsial. Pendekatan komprehensif dalam pendidikan karakter mencakup beberapa aspek, *Pertama*, pada aspek isi pendidikan karakter harus komprehensif mulai dari permasalahan yang berkaitan dengan pilihan-pilihan nilai yang bersifat pribadi hingga pertanyaan-pertanyaan mengenai etika umum. *Kedua*, pada aspek metode pendidikan karakter yang juga harus komprehensif meliputi inkulkasi nilai, keteladanan, dan pelatihan untuk pembuatan keputusan moral secara bertanggung jawab. *Ketiga*, pada aspek lokusnya yakni pendidikan karakter hendaknya dilangsungkan dalam keseluruhan proses pendidikan di kelas, kegiatan ekstrakurikuler, dan semua aspek kehidupan di sekolah. *Keempat*, pendidikan karakter perlu dilangsungkan dalam kehidupan masyarakat (Zuchdi, 2009).

Pendidikan karakter di sekolah telah lama ada terutama melalui pendidikan agama maupun pendidikan moral namun pendidikan karakter yang secara resmi dilangsungkan di sekolah baru ada sejak tahun 2010 melalui penancangan resmi oleh Menteri Pendidikan Nasional pada waktu itu (Lubis, 2019). Hal tersebut tampak pada dikeluarkannya Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025 yang menyatakan bahwa karakter adalah hasil keterpaduan empat bagian, yakni olah hati, olah pikir, olahraga, serta olah rasa dan karsa. Terdapat banyak nilai karakter yang hendak ditanamkan melalui pendidikan karakter tersebut termasuk nilai nasionalisme didalamnya melalui pengintegrasian pada mata pelajaran, pelaksanaan kegiatan pembinaan peserta didik, dan kegiatan pengelolaan semua urusan di sekolah yang melibatkan semua warga sekolah (Marzuki, 2012). Setelahnya kemudian dikeluarkan kebijakan mengenai Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) pada 2017 berdasarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal serta Peraturan Dirjen Dikdasmen No. Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa Gerakan PPK merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) (Dirjen Dikdasmen RI, 2019; Kemdikbud RI, 2018; Presiden RI, 2017). Gerakan PPK ditujukan untuk mewujudkan Nawacita dan Gerakan Nasional Revolusi Mental serta sebagai upaya membangun karakter bangsa (Hendarman, 2017). Bisa pula dikatakan bahwa Gerakan PPK adalah lanjutan serta revitalisasi dari Gerakan Nasional Pendidikan Karakter yang dimulai pada tahun 2010 (Faturrahman, dkk., 2022). Tetapi adapula yang menilai bahwa Gerakan PPK hanyalah reinkarnasi dari Program *Full Day School* serta pemaksaan paradigma revolusi mental kepada masyarakat (Ariandy, 2019). Namun demikian, Gerakan PPK telah menjadi suatu landasan bagi pelaksanaan pendidikan karakter di banyak sekolah di Indonesia termasuk penanaman nilai nasionalisme di dalamnya sebagai salah satu dari lima nilai utama yang harus ditanamkan melalui Gerakan PPK. Melalui Gerakan PPK, sekolah diarahkan untuk dapat melaksanakan pendidikan karakter secara lebih masif, komprehensif dan berkelanjutan (Andin, 2018; Dewayani, 2018; Fernanda, 2018; Hendarman, 2017; Suhadisiwi, 2018). Untuk mengimplementasikan

Gerakan PPK di sekolah, pemerintah telah menyusun peraturan perundang-undangan hingga pedoman implementasi Gerakan PPK yang dapat diakses melalui laman <https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/>.

Adanya Gerakan penguatan pendidikan karakter sebagai babak baru pendidikan karakter di Indonesia sejatinya menyajikan harapan baru sekaligus skeptis apakah konsepsi yang disajikan dapat mendorong penanaman nilai nasionalisme yang tepat atau tidak?. Untuk itu, peneliti tertarik untuk mengkaji konsepsi penanaman nilai nasionalisme dalam pendidikan karakter di sekolah melalui Gerakan PPK dan relevansinya bagi pembentukan karakter nasionalisme generasi muda Indonesia saat ini. Penelitian ini menyajikan potret penanaman nilai nasionalisme dalam konsepsi pendidikan karakter melalui gerakan PPK dan relevansinya untuk sesuai perkembangan zaman saat ini.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis konten yang bersifat inferensial (inferential content analysis). Fokus penelitiannya terletak pada konsepsi pendidikan nasionalisme dalam desain pendidikan karakter di sekolah pada Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter. Peneliti ini menggunakan suatu konstruk analitis sebagai dasar inferensi (Zuchdi & Afifah, 2019). Konstruk analitis dalam penelitian ini yaitu Pendidikan Karakter dalam Gerakan PPK memuat penanaman nilai nasionalisme. Sumber data penelitian meliputi infografis, modul dan buku saku untuk panduan implementasi Gerakan PPK serta peraturan perundang-undangan terkait yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui laman <https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/> yakni seperti (1) Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter; (2) Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal; (3) Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 097/D/HK/2019 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal; (4) buku Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan karakter; (5) Infografis Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter; (6) Buku Panduan Praktis PPK Berbasis Kelas; (7) Buku Panduan Praktis PPK Berbasis Budaya Sekolah; (8) Buku Panduan Praktis PPK Berbasis Masyarakat; (9) Buku Panduan Praktis Pelibatan Tripusat Pendidikan dalam PPK oleh Kepala Sekolah.

Prosedur analisis konten pada penelitian ini meliputi (1) pengadaan data; (2) pengurangan (reduksi) data; (3) Inferensi; (4) Analisis (Zuchdi & Afifah, 2019). Pertama, pengadaan data dalam penelitian ini berupa penentuan unit, penentuan sampel, dan pencatatan data mengenai penanaman nilai nasionalisme dalam pendidikan karakter di sekolah melalui Gerakan PPK. Kedua, pengurangan (reduksi) data melalui penghilangan data yang tidak relevan. Ketiga, inferensi dengan berusaha sebaik mungkin agar tidak mengurangi makna simboliknya dan dengan menggunakan konstruk analisis yakni Pendidikan Karakter dalam Gerakan PPK memuat penanaman nilai nasionalisme. Keempat, analisis kualitatif untuk menganalisis konsepsi penanaman nilai nasionalisme dalam desain pendidikan karakter di sekolah melalui Gerakan PPK.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsepsi Pendidikan Karakter Pada Gerakan PPK untuk Menanamkan Nilai Karakter Nasionalisme**

Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter sangat bernuansa politis. Pencanangan Gerakan PPK oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah tindak lanjut atas adanya arahan Presiden kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengutamakan dan membudayakan pendidikan karakter dalam rangka merealisasikan Nawacita (Nawacita 8) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) setelah ia mulai menjabat sebagai Presiden Indonesia bersama Jusuf Kalla sebagai Wakil Presidennya pada periode 2014-2019. Perpres No. 87 Tahun 2017 secara eksplisit menyatakan hal tersebut bahwa:

*“Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui*

*harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)'' (Kemdikbud RI, 2018).*

Revolusi Mental, selain sebagai jargon kampanye Jokowi-JK pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 juga menjadi basis bagi penyusunan program pemerintah melalui dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 16 tahun 2016 Tentang Gerakan nasional Revolusi Mental dan peraturan pendukung lainnya. Gagasan dasar dari Revolusi Mental ditujukan untuk membangun jiwa bangsa, yaitu jiwa merdeka, jiwa kebebasan untuk meraih kemajuan (Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, 2021). Semangat Revolusi Mental adalah melanjutkan perjuangan besar mengisi janji kemerdekaan yang dinyatakan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1957, yang bertujuan untuk membangkitkan lagi semangat perubahan berkemajuan bangsa Indonesia (Hendarman, 2017). Sehubungan dengan itu, secara skeptis, Gerakan PPK juga dinilai hanyalah reinkarnasi dari Program *Full Day School* serta pemaksaan paradigma revolusi mental kepada masyarakat (Ariandy, 2019). Namun demikian, munculnya Gerakan PPK ini secara tidak langsung telah menggantikan prakarsa pendidikan karakter di sekolah sebelumnya yang bermuara dari Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025 (Marzuki, 2012). Gerakan PPK juga menjadi lanjutan serta revitalisasi dari Gerakan Nasional Pendidikan Karakter yang dimulai pada tahun 2010 (Faturrahman et al., 2022).

Konsepsi pendidikan karakter melalui Gerakan PPK sebagaimana dibahas berikut ini: *Pertama*, paradigma dalam pendidikan karakter melalui Gerakan PPK menyatakan bahwa pengolahan karakter peserta didik berdimensi olah hati (etik), olah rasa (estetis), olah pikir (literasi) dan olahraga (kinestetik). Dengan demikian, penanaman nilai-nilai karakter termasuk nilai nasionalisme dalam pendidikan karakter melalui Gerakan PPK harus dilaksanakan secara terpadu dan serempak antara olah hati (etik), olah rasa (estetis), olah pikir (literasi) dan olahraga (kinestetik). Hal sebagaimana pemikiran Ki Hadjar Dewantara mengenai pendidikan bahwa pendidikan haruslah merupakan harmonisasi olah hati (etik), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi) dan olahraga (kinestetik) (Dewantara, 2011; Zulfiati, 2019). Olah hati terkait perasaan sikap dan keyakinan/keimanan. Kemudian olah pikir terkait proses nalar guna mencari dan menggunakan pengetahuan secara kritis, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya, olahraga terkait proses persepsi, kesiapan, peniruan, manipulasi, dan penciptaan aktivitas baru disertai sportivitas. Terakhir, olah rasa dan karsa berkenaan dengan kemauan dan kreativitas yang tecermin dalam kepedulian, pencitraan, dan penciptaan kebaruan (Marzuki, 2012). Pendidikan karakter yang demikian ditujukan untuk membangun jiwa manusia agar memiliki keberadaban (berbudi pekerti luhur), dan merdeka lahir-batin serta berkemajuan melalui tuntunan terhadap dimensi Trisakti Jiwa yakni *cipta*, *rasa* dan *karsa*. *Cipta* adalah kemampuan berpikir untuk mencari kebenaran. *Karsa* adalah gerak-gerak hati atau hal-hal yang terkait dengan perasaan. Sedangkan *karsa* adalah kehendak atau kemauan sebagai penjelmaan hawa nafsu manusia setelah dipertimbangkan oleh akal dan perasaan (Dewantara, 2011).

Pendidikan karakter memanglah harus menggunakan pendekatan yang komprehensif-holistik yakni yang meliputi dimensi kognitif, emosional, dan perilaku peserta didik (Sudrajat, 2011). Hal itu sejalan dengan pemikiran era kontemporer bahwa pendidikan karakter janganlah berfokus pada satu aspek saja namun harus memenuhi tiga unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan (*kognitif*), mencintai kebaikan (*afektif*) dan melakukan kebaikan (*psikomotorik*) (Lickona, 2018; Marzuki, 2012; Sudrajat, 2011; Williams, 2000). Atau kalau dalam pemikiran Kirschenbaum (1995) pendidikan karakter dengan pendekatan komprehensif pada aspek isinya tidak boleh parsial namun harus komprehensif mulai dari permasalahan yang berkaitan dengan pilihan-pilihan nilai yang bersifat pribadi hingga pertanyaan-pertanyaan mengenai etika umum (Zuchdi et al., 2013). Ini berarti bahwa dalam penanaman nilai nasionalisme harus berdimensi kognitif, afektif dan psikomotorik secara terpadu dan serempak. Kemudian nilai nasionalisme harus ditanamkan melalui selain

meliputi aspek-aspek pilihan nilai yang menyangkut pribadi peserta didik sebagai warga negara namun juga perlu juga membelajarkan peserta didik dengan aspek-aspek etika umum atau kebajikan publik (*public virtue*).

*Kedua*, pada aspek nilai karakter pada pendidikan karakter melalui Gerakan PPK menetapkan adanya 5 nilai utama sebagai nilai prioritas yang harus dikembangkan yakni (1) Religius; (2) Nasionalis; (3) Mandiri; (4) Gotong Royong; (5) Integritas. Kelima nilai tersebut adalah diwujudkan melalui diterapkannya nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter khususnya nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Kelima nilai utama harus dikembangkan dalam diri pribadi peserta didik melalui pendidikan karakter dengan tidak dikembangkan sendiri-sendiri namun saling berinteraksi satu sama lain hingga membentuk keutuhan atau kebulatan kelima nilai tersebut. Masing-masing nilai tersebut diberi makna tersendiri namun bukan berarti nilai yang bersifat tunggal karena ia ditopang oleh sub nilainya masing-masing. Nilai karakter nasionalisme dimaknai sebagai cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Nilai karakter nasionalisme sendiri memiliki sub nilai berupa apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul, dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, suku, dan agama.

Kemudian, pada Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 097/D/HK/2019 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal disajikan contoh-contoh kegiatan untuk pembiasaan nilai karakter utama yang dapat dilaksanakan di sekolah baik berupa kegiatan rutin, terprogram maupun insidental. Misalnya untuk nilai karakter nasionalisme salah satu bentuk kegiatannya berupa (1) pembiasaan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, lagu nasional dan/atau lagu daerah, setiap hari pada waktu tertentu sebagai pendidikan karakter berbasis budaya sekolah; (2) Pada saat pembelajaran, Guru menggunakan nama-nama pahlawan, tanaman, hewan, sungai, gunung, pulau, buah, bunga yang tumbuh di sekitar lingkungan atau Indonesia sebagai nama kelompok siswa yang pendidikan karakter nasionalisme berbasis kelas; (3) Mengundang narasumber dari kalangan masyarakat misalnya veteran perang, TNI, atau POLRI, untuk menyampaikan materi tentang perjuangan, penegakan hukum, penegakan disiplin, dan bela negara; dan seterusnya.

Pada pendidikan karakter dalam Gerakan PPK, nilai nasionalisme menjadi salah satu dari lima nilai utama (prioritas) yang ditanamkan pada peserta didik. Hal ini berbeda dengan kedudukan nilai nasionalisme dalam pendidikan karakter yang dikembangkan Direktorat Pembinaan SMP Kemdikbud RI pada 2010 yang hanya menempatkan nilai nasionalisme sebagai salah satu dari 24 nilai karakter bagi peserta didik (Marzuki, 2012; Muchtar & Suryani, 2019). Selain itu, kendatipun nilai nasionalisme menjadi nilai utama (prioritas) namun bukan berarti pendidikan karakter di sekolah akan mengarusutamakan nilai karakter nasionalisme sebab ada ruang untuk pihak sekolah untuk memilih nilai karakter yang akan dijadikan penjenamaan sekolah (*school branding*) dan kesesuaiannya dengan cakupan mata pelajaran ataupun dengan program-program dan kegiatan yang akan diprakarsai pihak sekolah. Disisi lain pemaknaan nilai nasionalisme hingga perwujudannya dalam kegiatan-kegiatan pendidikan karakter di sekolah sangat ditentukan oleh pihak sekolah khususnya kepala sekolah dan Guru. Sebab pemaknaan dan contoh kegiatan yang disediakan dalam instrumen petunjuk gerakan PPK (peraturan perundangan dan modul implementasi) sangat terbatas apalagi jika hendak menanamkan nilai nasionalisme dengan merespon pada tantangan dan perkembangan nasionalisme masa kini. Misalnya pemaknaan nilai karakter nasionalisme beserta sub nilainya sebagaimana dijelaskan sebelumnya hanya menekankan pada aspek nasionalisme yang menekankan pada individu peserta didik sebagai warga negara-bangsa.

Pemaknaan tersebut belum menyeluruh pada nilai nasionalisme dalam konteks nilai kepublikan (*public virtue*) yang merupakan dimensi internal nasionalisme yang harus diwujudkan oleh negara-bangsa seperti keadilan sosial (kesejahteraan), kemerdekaan, demokrasi, kesamaan dan prestasi sebagai wujud kesejajaran antara masa rakyat dengan penguasa sekaligus di dalamnya melekat impian-impian dan harapan rakyat yang harus diwujudkan sebagai bagian integral dari pakta perjanjian (Lay, 2006). Yudi Latif juga menjelaskan bahwa nasionalisme Indonesia bukan hanya memiliki dimensi ke dalam berupa semangat persatuan dan kebangsaan namun juga mengandung dimensi ke luar yakni nasionalisme yang memuliakan kemanusiaan universal dengan menjunjung tinggi persaudaraan, perdamaian, dan keadilan antar umat manusia (Latif, 2015, p. 373). Realisasi Nasionalisme atau persatuan Indonesia juga bukanlah suatu hasil yang sifatnya statis sebatas pada persatuan bangsa, negara dan wilayah Indonesia namun suatu yang sifatnya dinamis yakni memelihara, mengembangkan, dan meningkatkan persatuan Indonesia menuju tercapainya cita-cita bersama (merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur) (Kaelan, 2009, pp. 183–185) . Dengan demikian, pemaknaan nilai karakter nasionalisme dalam Gerakan PPK masih menekankan pada pemaknaan bahwa nasionalisme sebatas hak monopoli negara untuk menekankan kewajiban mutlak pada warganya agar berkorban tanpa pamrih bagi bangsa dan negara. Selain itu, pemaknaan dan pemberian contoh-contoh kegiatan dalam Gerakan PPK juga belum secara spesifik merespon tantangan nasionalisme Indonesia di era globalisasi saat ini seperti degradasi moral, radikalisme, disintegrasi bangsa, intoleransi, ketidakadilan hukum dan sosial, konflik politik dan sosial dan sebagainya. Jika hanya sebatas pada hal demikian maka penanaman nilai karakter nasionalisme yang dilaksanakan sangat rentan terjebak pada sebuah indoktrinasi tanpa betul-betul mampu membangun insan berkarakter nasioanalisme yang utuh dan relevan dengan tantangan zaman. Hal tersebut layak menjadi perhatian serius sebab nilai karakter merupakan hal pokok dalam pendidikan karakter karena merupakan muatan pendidikan karakter yang akan diberikan kepada siswa.

*Ketiga*, aktor pelaksana pendidikan karakter melalui Gerakan PPK di sekolah melibatkan seluruh stakeholder sekolah (kepala Sekolah, Guru, tenaga kependidikan serta warga sekolah lainnya), dan komite sekolah dengan menekankan pada kemitraan Tri Pusat Pendidikan (Sekolah, Keluarga dan Masyarakat) dengan menempatkan sekolah sebagai pemrakarsa kemitraan tersebut. Pada pihak sekolah melibatkan seluruh stakeholder sekolah (kepala Sekolah, Guru, tenaga kependidikan serta warga sekolah lainnya), dan komite sekolah. Kepala Sekolah berperan sebagai inovator, motivator dan kolaborator. Guru berperan sebagai penghubung sumber belajar, pelindung, fasilitator, dan katalisator. Tenaga kependidikan berperan membantu guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan PPK. Kemudian komite sekolah mendukung dan memperkuat program PPK di sekolah. Dalam implementasi Gerakan PPK, sekolah harus menjalin kemitraan dengan pihak-pihak eksternal seperti Orang Tua Siswa, Tokoh Masyarakat, Dunia Usaha Dan Dunia Industri (Dudi), Akademisi/ Pendidikan Tinggi, Pendidikan Formal Lainnya, Ahli/Pegiat/Komunitas/Organisasi/Lembaga Masyarakat, Lembaga Pemerintahan Lembaga Informasi dan Media dan lain sebagainya.

Gerakan PPK dilaksanakan berbasis kelas, berbasis budaya sekolah dan berbasis masyarakat dengan tidak mengubah kurikulum yang sudah ada melainkan optimalisasi kurikulum pada satuan pendidikan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, serta non kurikuler di lingkungan sekolah. Pendidikan karakter melalui optimalisasi kurikulum sekolah dapat ditempuh dengan tiga cara yakni (1) pengintegrasian pendidikan karakter pada setiap mata pelajaran melalui kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler. Maka Guru harus mengembangkan rencana pembelajaran yang mendukung penguatan pendidikan karakter sesuai dengan karakteristik mata pelajaran masing-masing; (2) pengimplementasian pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler dilakukan melalui kolaborasi dengan masyarakat dan pihak lain/lembaga yang relevan; (3) pembentukan kegiatan pembiasaan melalui budaya sekolah secara rutin, spontan, pengkondisian, dan keteladanan warga sekolah yang dilakukan di luar jam pembelajaran sesuai dengan situasi, kondisi, ketersediaan sarana dan prasarana di setiap satuan pendidikan. Selain itu, ada pula

struktur pendukung lain yakni pembentukan ekosistem dan budaya sekolah yang baik serta kemitraan dengan keluarga dan masyarakat dalam pendidikan karakter (Hendarman, 2017).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ada tiga basis pendidikan karakter dalam Gerakan PPK yakni berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, dan berbasis masyarakat. Pendidikan karakter berbasis kelas berupa (1) pengintegrasian proses pembelajaran di dalam kelas melalui isi kurikulum dalam mata pelajaran, baik itu secara tematik maupun terintegrasi dalam mata pelajaran; (2) penguatan manajemen kelas, pilihan metodologi, dan evaluasi pengajaran; (3) penguatan muatan lokal sesuai dengan kebutuhan daerah. Kemudian, pendidikan karakter berbasis budaya sekolah berupa (1) penekanan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah; (2) pengarusutamaan keteladanan orang dewasa di lingkungan pendidikan; (3) pelibatan seluruh ekosistem pendidikan di sekolah; (4) pengembangan dan pemberian ruang yang luas pada segenap potensi siswa melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler; (5) pemberdayaan manajemen dan tata kelola sekolah; dan (6) Mempertimbangkan norma, peraturan, dan tradisi sekolah. Terakhir, pendidikan karakter berbasis masyarakat berupa (1) penguatan peranan Komite Sekolah dan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan; (2) pelibatan dan pemberdayaan potensi lingkungan sebagai sumber pembelajaran seperti keberadaan dan dukungan pegiat seni dan budaya, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri; (3) mensinergikan pendidikan karakter dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan, dan LSM; dan (4) mensinkronkan program dan kegiatan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga pemerintahan, dan masyarakat pada umumnya (Hendarman, 2017).

Pendidikan karakter memanglah perlu menggunakan pendekatan komprehensif (Sudrajat, 2011; Zuchdi, 2009). Selain harus mencakup dimensi kognitif, emosional dan perilaku, pendidikan karakter juga harus melibatkan dan diintegrasikan pada setiap aspek kehidupan di sekolah dengan melibatkan semua pihak terkait termasuk orang tua siswa dan masyarakat. Ada 12 poin yang harus diperhatikan dalam membangun pendidikan karakter dengan pendekatan komprehensif di sekolah yakni (1) pengembangan sikap peduli di dalam dan di luar kelas; (2) Guru menjadi pembimbing, teladan, dan mentor; (3) penciptaan komunitas kelas yang peduli; (4) pemberlakuan disiplin secara kuat; (5) penciptaan lingkungan kelas demokratis; (6) memuat pendidikan karakter dalam tatanan kurikulum; (7) pembelajaran secara kooperatif; (8) pengembangan kecakapan penggunaan suara hati (nurani); (9) Mendorong dilakukannya refleksi moral; (10) Mengajarkan cara-cara menyelesaikan konflik; (11) adanya kemitraan dengan orang tua/wali siswa dan masyarakat; (12) penciptaan budaya sekolah yang berkarakter (Sudrajat, 2011).

Berkenaan dengan kemitraan antara sekolah, orang tua dan masyarakat dalam pendidikan pada peserta didik disarankan agar menggunakan bentuk kemitraan holistik yang berarti bahwa semua pihak saling mendukung dan membantu satu sama lain dengan sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah serta melaksanakan pendidikan di lingkungannya masing-masing secara kolaboratif, komprehensif, terkoneksi, dan berkelanjutan. Sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 1.



Gambar. 1. model kemitraan holistik pendidikan karakter  
Sumber: (Cheng, 2005; Epstein, 2011; Hornby, 2011; Lickona, 1996)

Bentuk-bentuk kemitraan holistik dalam pendidikan karakter yakni: (1) sekolah harus bisa menegaskan pada orang tua bahwa merekalah pendidik moral pertama dan utama bagi siswa; (2) sekolah harus

membangun komunikasi yang baik dengan orang tua berkenaan dengan tujuan dan kegiatan pendidikan karakter dan bagaimana keterlibatan orang tua di dalamnya ; (3) orang tua diberi ruang untuk terlibat dalam perencanaan dan pembentukan kebijakan pendidikan karakter agar terbangun rasa kepemilikan bersama dan saling percaya antara sekolah dengan orang tua; (4) orang tua harus diberi pemahaman dan bahkan diberi ruang untuk bersama-sama dengan sekolah menentukan nilai-nilai inti karakter yang akan ditanamkan pada siswa; (5) orang tua juga harus diberi pemahaman mengenai bagaimana nilai-nilai karakter akan ditanamkan pada peserta didik; (6) Sekolah perlu memprakarsai pembentukan komite kepemimpinan orang tua (paguyuban orang tua) untuk mewedahi dan memudahkan peran serta orang tua siswa dalam pelaksanaan pendidikan karakter bagi siswa di sekolah; (7) pihak sekolah perlu memberikan kerangka kerja maupun lembar kerja pada orang tua untuk pelaksanaan pendidikan karakter di rumah yang sejalan/mendukung pendidikan karakter di sekolah; (8) sekolah dan orang tua siswa secara bersama-sama menjalin kemitraan juga dengan masyarakat sekitar seperti komunitas bisnis, lembaga keagamaan, organisasi pemuda, pemerintah dan media untuk mempromosikan nilai-nilai karakter (Lickona, 1996). Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan karakter dapat dilangsungkan pada setiap aspek pendidikan karakter pada peserta didik di sekolah, hingga pelaksanaan formulasi kebijakan pendidikan karakter yang hendak diterapkan di sekolah (Cheng, 2005). Dalam konteks ini, sekolah sebagai *leading sector* pendidikan karakter bagi peserta didik harus proaktif memprakarsai adanya kemitraan holistik dengan orang tua siswa dan masyarakat. Selain itu, ada tujuh prinsip yang harus dimiliki dalam pelaksanaan model kemitraan holistik dalam pendidikan yakni: *Trust* (saling percaya), *Respect* (saling menghormati), *Competence* (Kepercayaan pada kompetensi profesional), *Communication* (Komunikasi dua arah), *Commitment* (adanya komitmen jangka panjang), *Equality* (kesetaraan), dan *Advocacy* (pengadvokasian sejak dini terhadap siswa) (Hornby, 2011). Konsepsi Gerakan PPK sebenarnya telah memberikan ruang untuk dilaksanakannya kemitraan holistik tersebut namun demikian dalam implementasinya sangat tergantung dari adanya prakarsa pihak sekolah, keluarga dan masyarakat itu sendiri.

*Keempat*, terkait strategi/metode pendidikan karakter dalam Gerakan PPK di sekolah menekankan pada keteladanan, pembiasaan dan komitmen stakeholder sekolah. Strategi/metode tersebut tidak dikhususkan untuk salah satu nilai karakter saja melainkan generik untuk semua nilai karakter yang akan diajarkan pada peserta didik. Peneliti beranggapan bahwa strategi/metode tersebut baru sebatas minimal sehingga pihak sekolah perlu mengelaborasi strategi/metode lain yang relevan untuk diterapkan dalam pelaksanaan pendidikan karakter. Memang strategi pendidikan karakter yang dianggap efektif diterapkan di sekolah diantaranya yaitu: (1) pembelajaran (*teaching*), (2) keteladanan (*modeling*), (3) penguatan (*reinforcing*), dan (4) pembiasaan (*habituating*) (Sudrajat, 2011). Namun perlu diingat bahwa pendidikan karakter dengan pendekatan yang komprehensif harus meliputi dimensi kognitif, emosional (afektif) dan perilaku sehingga strategi yang diterapkan juga harus disesuaikan dengan domain yang diajarkannya. Selain itu, pendidikan karakter dengan pendekatan komprehensif perlu menerapkan empat metode pendidikan karakter yakni: (1) inkulkasi nilai; (2) keteladanan; (3) fasilitasi (pelatihan penyelesaian masalah); (4) pengembangan keterampilan akademik dan sosial seperti kemampuan berpikir kritis dan keterampilan menyelesaikan masalah (Zuchdi, 2009). Hal tersebut memungkinkan sebab pendidikan karakter dan pendidikan moral dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan antara lain pendekatan penanaman nilai (*inculcation approach*), pendekatan perkembangan moral kognitif (*cognitive moral development approach*), pendekatan analisis nilai (*values analysis approach*), pendekatan klarifikasi nilai (*values clarification approach*) dan pendekatan pembelajaran berbuat (*action learning approach*) baik di sekolah maupun dalam lingkungan keluarga dan masyarakat (Zuriah, 2007). dengan demikian, strategi/metode yang harus digunakan dalam pendidikan karakter nilai nasionalisme juga harus disesuaikan dengan strategi dalam penggunaan pendekatan komprehensif tersebut di atas.

## SIMPULAN

Pendidikan karakter melalui Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) menghendaki adanya pendidikan karakter secara lebih masif dan terencana di sekolah. Sebagai suatu kebijakan pemerintah, kemunculannya cukup bernuansa politis sebagai aktualisasi dari Nawacita (Nawacita 8) dan kebijakan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Namun demikian, Gerakan PPK merupakan pembaruan kebijakan pendidikan karakter yang telah digagas sebelumnya. Konsepsi pendidikan karakter melalui gerakan PPK tampak hendak mengoptimalkan berbagai aspek dalam pendidikan karakter di sekolah. *Pertama*, pada aspek paradigma, pendidikan karakter melalui Gerakan PPK masih mengadopsi pemikiran pendidikan Ki Hadjar Dewantara seperti pemikiran bahwa pendidikan merupakan olah hati, olah pikir, olah rasa dan olahraga yang dilangsungkan oleh Tripusat pendidikan. Dimensi pendidikan karakternya mencakup pada dimensi kognitif, emosional dan perilaku untuk semua nilai karakter. *Kedua*, pada aspek nilai karakter lebih terfokus pada lima nilai karakter utama termasuk nilai nasionalisme sebagai salah satu diantaranya. Namun demikian pemaknaan dan perwujudan nilai nasionalisme yang dicantumkan dalam konsepsi Gerakan PPK masih memerlukan reinterpretasi dan revitalisasi agar lebih komprehensif dan bersesuaian dengan tantangan zaman di era kontemporer. *Ketiga*, pada aspek ruang lingkup pendidikan karakter di sekolah menekankan adanya perluasan pada setiap aspek kehidupan di sekolah. *Keempat*, pada aspek pihak yang terlibat menekankan adanya keterlibatan berbagai pihak seperti orang tua siswa dan masyarakat selain stakeholder sekolah itu sendiri yang mengarah pada penciptaan kemitraan holistik. Kendati demikian masih diperlukan penajaman dan uraian lebih lanjut. *Kelima*, pada aspek metode sangat menekankan pada metode keteladanan dan pembiasaan serta komitmen. Hal ini masih sebatas metode minimal dalam pendidikan karakter karena belum cukup bila hendak menerapkan pendidikan karakter dengan pendekatan komprehensif. Apalagi setiap nilai seperti nilai nasionalisme memiliki unsur-unsurnya tersendiri sehingga memerlukan metode yang lebih variatif dan relevan dalam mengajarkannya. Secara konseptual, pendidikan karakter melalui gerakan PPK hendak mengoptimalkan prakarsa pendidikan karakter di sekolah pada semua lini yang mengarah pada pendidikan karakter dengan pendekatan komprehensif namun menurut hasil kajian peneliti hal tersebut masih harus lebih dioptimalkan lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfaqi, M. Z. (2015). Memahami Indonesia Melalui Prespektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 28(2), 113–114. [Http://Journal.Um.Ac.Id/Index.Php/Jppk/Article/View/5451/2120](http://Journal.Um.Ac.Id/Index.Php/Jppk/Article/View/5451/2120)
- Andin, S. N. (2018). *Panduan Praktis Pelibatan Tripusat Pendidikan Dalam Ppk*. Pusat Analisis Dan Sinkronisasi Kebijakan (Paska).
- Aulia, L. R., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Mengenal Indentitas Nasional Indonesia Sebagai Jati Diri Bangsa Untuk Menghadapi Tantangan Di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8549–8557. [Https://Www.Jptam.Org/Index.Php/Jptam/Article/View/2355](https://Www.Jptam.Org/Index.Php/Jptam/Article/View/2355)
- Azca, M. N. (2013). Yang Muda, Yang Radikal: Refleksi Sosiologis Terhadap Fenomena Radikalisme Kaum Muda Muslim Di Indonesia Pasca Orde Baru. *Maarif*, 8(1-Juli 2013, Hlm, 20.).
- Berkowitz, M. W., & Hoppe, M. A. (2009). Character Education And Gifted Children. *High Ability Studies*, 20(2), 131–142. [Https://Doi.Org/10.1080/13598130903358493](https://Doi.Org/10.1080/13598130903358493)
- Carr, D. (2014). Pendidikan Karakter Sebagai Penanaman Kebajikan. In L. P. Nucci & D. Narvaez (Eds.), *Hand Book Pendidikan Moral Dan Karakter*. Nusa Media.
- Cathrin, S., & Wikandaru, R. (2023). The Future Of Character Education In The Era Of Artificial Intelligence. *Humanika*, 23(1), 91–100. [Https://Doi.Org/10.21831/Hum.V23i1.59741](https://Doi.Org/10.21831/Hum.V23i1.59741)
- Cheng, Y. C. (2005). Reengineering Total Home-School Partnership. In *New Paradigm For Re-Engineering*

- 1311 *Penanaman Nilai Nasionalisme dalam Pendidikan Karakter di Sekolah Melalui Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter - Cucu Sutrisno, Samsuri*  
DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i3.4981>
- Education Education In The Asia-Pacific Region : Issues , Concerns And Prospects* (Pp. 457–474). Springer.
- Dewantara, K. H. (2011). *Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian Pertama Pendidikan* (4th Ed.). Yayasan Persatuan Taman Siswa.
- Dewayani, S. (2018). *Panduan Praktis Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (Ppk) Berbasis Kelas*. Pusat Analisis Dan Sinkronisasi Kebijakan (Paska).
- Dirjen Dikdasmen Ri. (2019). *Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor : 097/D/Hk/2019 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 097/D/Hk/2019)*. Dirjen Dikdasmen Ri.
- Elias, M. J., Bryan, K., Patrikakou, E. N., & Weissberg, R. P. (2003). Challenges In Creating Effective Home-School Partnerships In Adolescence: Promising Paths For Collaboration. *School Community Journal*, 13(1), 133–153.
- Epstein, J. L. (2011). School, Family, And Community Partnerships. In *School, Family, And Community Partnerships, Student Economy Edition: Preparing Educators And Improving Schools* (2nd Ed., Pp. 389–414). Westvie Press. <https://doi.org/10.4324/9780429493133>
- Faturochman, & Kusumawardani, A. (2004). Nasionalisme. *Buletin Psikologi*, 7(2, Desember 2004), 38–48.
- Faturrahman, Setiawan, F., Astuti, W. D., & Khasanah, K. (2022). Analisis Kebijakan Program Penguatan Pendidikan Karakter. *Tsaqofah*, 2(4), 466–474.
- Fernanda, N. (2018). *Panduan Praktis Implementasi Ppk Berbasis Masyarakat*. Pusat Analisis Dan Sinkronisasi Kebijakan (Paska).
- Handayani, S. A. (2019). Nasionalisme Dalam Perubahan Di Indonesia: Adaptasi Atau Transplantasi. *Historia*, 1(2), 154–170.
- Hendarman. (2017). *Konsep Dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter*. Pusat Analisis Dan Sinkronisasi Kebijakan Sekertariat Jendral Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Hornby, G. (2011). Parental Involvement Child Education Building Effective School-Family Partnerships. In *Journal Of Chemical Information And Modeling* (Vol. 53, Issue 9). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4419-8379-4>
- Kaelan. (2009). *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Paradigma.
- Kahin, G. M. (2013). *Nasionalisme & Revolusi Indonesia* (T. K. Bambu (Ed.); I). Komunitas Bambu.
- Kemdikbud Ri. (2018). *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor Nomor 20 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Permendikbud Ri No. 20 Tahun 2018)*. Kemdikbud Ri.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Latif, Y. (2015). *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas Dan Aktualitas Pancasila* (V). Pt Gramedia.
- Lay, C. (2006). Nasionalisme Dan Negara Bangsa. *Jurnal Ilmu Sosial & Politik*, 10(2), 165–180.
- Lickona, T. (1996). Eleven Principles Of Effective Character Education. *Journal Of Moral Education*, 25(1), 93–100. <https://doi.org/10.1080/0305724960250110>
- Lickona, T. (2018). *Pendidikan Karakter Panduan Lengkap Mendidik Siswa Menjadi Pintar Dan Baik* (Iv). Nusa Media.
- Lubis, R. R. (2019). Historisitas Dan Dinamika Pendidikan Karakter Di Indonesia. *An-Nahdhah*, 1(2), 70–82.
- Marzuki. (2012). Intergating Character Education In The Teaching And Learning At School. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 2(1), 33–44.

- 1312 *Penanaman Nilai Nasionalisme dalam Pendidikan Karakter di Sekolah Melalui Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter - Cucu Sutrisno, Samsuri*  
DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i3.4981>
- Menko Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Ri. (2021). Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental (Permenko Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan No. 6 Tahun 2021). In *Frontiers In Neuroscience* (Vol. 14, Issue 1). Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Muchtar, D., & Suryani, A. (2019). Pendidikan Karakter Menurut Kemendikbud. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 3(2), 50–57. <https://doi.org/10.33487/Edumaspul.V3i2.142>
- Pala, A. (2011). The Need For Character Education. *International Journal Of Social Sciences And Humanity Studies*, 3(2), 23–32.
- Pangestu, F. (2022). Nasionalisme Pendidikan Ki Hadjar Dewantara Dalam Bingkai Pancasila. *Jurnal Pancasila Dan Bela Negara*, 2(1), 40–51. <https://doi.org/10.31315/Jpbn.V2i1.6728.G4295>
- Presiden Ri. (2017). *Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Perpes Ri No. 87 Tahun 2017)*. Menteri Hukum Dan Ham Ri.
- Puspita Ratri, E., & Najicha, F. U. (2022). Urgensi Pancasila Dalam Menanamkan Jiwa Nasionalisme Pada Generasi Muda Di Era Globalisasi. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1), 25–33. <https://doi.org/10.33061/Jgz.V11i1.7455>
- Sudrajat, A. (2011). Mengapa Pendidikan Karakter? *Jurnal Pendidikan Karakter*, 1(1), 47–58. <https://doi.org/10.21831/Jpk.V1i1.1316>
- Suhadisiwi, I. (2018). *Panduan Praktis Implementasi Ppk Berbasis Budaya Sekolah*. Pusat Analisis Dan Sinkronisasi Kebijakan (Paska).
- Sulistiyono, S. T. (2018). Nasionalisme, Negara-Bangsa, Dan Integrasi Nasional Indonesia: Masih Perlukah? *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 3(1), 3. <https://doi.org/10.14710/Jscel.V3i1.17912>
- Supardan, D. (2011). Tantangan Nasionalisme Indonesia Dalam Era Globalisasi. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Budaya Dan Sosial*, 2(4), 37–72.
- Supratikno, A. (2022). Reinforcing Indonesian National Identity Based On Inclusiveness Of Pancasila As A Way To Deal With The Identity Politics In Indonesia. *International Journal Of Multicultural And Multireligious Understanding*, 9(6), 407–417.
- Syahira Azima, N., Furnamasari, Y. F., & Dewi, D. A. (2021). Pengaruh Masuknya Budaya Asing Terhadap Nasionalisme Bangsa Indonesia Di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7491–7496.
- Williams, M. M. (2000). Models Of Character Education: Perspectives And Developmental Issues. *Journal Of Humanistic Counseling, Education And Development*, 39(I September 2000), 32–40.
- Zuchdi, D. (2009). *Humanisasi Pendidikan Menemukan Kembali Pendidikan Yang Manusiawi (Ii)*. Bumi Aksara.
- Zuchdi, D., & Afifah, W. (2019). *Analisis Konten Etnografi & Grounded Theory Dan Hermeneutika Dalam Penelitian* (Bumi Aksara (Ed.); I).
- Zuchdi, D., Kunprasetya, Z., & Masruri Siasah, M. (2013). *Model Pendidikan Karakter Terintegrasi Dalam Pembelajaran Dan Pengembangan Kultur Sekolah (Ii)*. Multi Presindo.
- Zuchdi, D., Kuntoro, S. A., Kunprasetya, Z., Marzuki, & Isroah. (2012). *Pendidikan Karakter Konsep Dasar Dan Implementasinya* (Sismono La Ode (Ed.)). Uny Press.
- Zulfiati, H. M. (2019). Pendidikan Karakter Perspektif Ki Hadjar Dewantara Dalam Membentuk Generasi Unggul Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Pgsd, Isbn 978-6*(April), 1–6.
- Zuriah, N. (2007). *Pendidikan Moral Dan Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan Menggagas Platfooooo Pendidikan Budi Pekerti Secara Kontekstual Dan Futuristik*. Pt Bumi Aksara.